



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diatur dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
7. Dinas Pertambangan Dan Energi adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Katingan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
11. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain;

12. Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
13. Harga dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan air baku dikalikan faktor nilai air.
14. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukkan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan;
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah;
- (2) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, pengairan perikanan rakyat, dan peribadatan; dan/atau;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan militer, pemadam kebakaran, panti asuhan, atau untuk penelitian;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Air Tanah, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah, adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan / atau memanfaatkan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu DASAR PENGENAAN DAN TARIP

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT);

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- a) jenis sumber air;
 - b) lokasi sumber air;
 - c) tujuan pengambilan;
 - d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e) kualitas air, dan
 - f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air;

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dihitung dengan mengkalikan Volume Air yang diambil (V) dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (3) Untuk mengetahui volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan secara obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diwajibkan untuk menyediakan meteran air yang pemasangan dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan peneraan dan / atau penyegelan atas meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jika Wajib Pajak tidak dapat menyediakan meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pajak Air Tanah ditetapkan secara jabatan dengan menghitung Volume Air yang diambil (V) dikalikan dengan Harga Dasar Air.

Pasal 7

Bupati dapat melakukan penutupan atas pengambilan/ pemanfaatan Air Tanah apabila :

- (1) Tidak membayar pajak sesuai ketentuan.
- (2) Tidak memasang meteran air.
- (3) Merusak, menghilangkan, merekayasa, mengganti meteran air dan / atau segel.

Pasal 8

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) mengandung 2 (dua) komponen yaitu berupa Volume dan berupa Harga Dasar Air;
- (2) Komponen berupa Volume adalah besarnya pengambilan air.

- (3) Komponen Harga Dasar Air besarnya ditentukan dari :
- a) Komponen Sumber Daya Alam, yang nilainya ditentukan oleh faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah;
 - b) Komponen Kompensasi Pemulihan, meliputi biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah, biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi, biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah, biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah;
 - c) Komponen Kompensasi Peruntukkan dan Pengelolaan, dibedakan sebagai berikut :
 - Non Niaga;
 - Niaga Kecil;
 - Industri Kecil;
 - Niaga Besar;
 - Industri Besar.
- (4) Kombinasi komponen air tanah sebagai sumber daya alam dikelompokkan dan diberi bobot sebagai berikut :

Tabel a. Bobot Komponen Sumberdaya Alam

| No | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|----|---|-----------|-------|
| 1 | Air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif | 3 | 9 |
| 2 | Air tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif | 2 | 4 |
| 3 | Air tanah, kualitas jelek | 1 | 1 |

- (5) Komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukkan dan pengelolaan ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan (subyek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif, dikelompokkan dan diberi bobot sebagai berikut :

Tabel b. Bobot Komponen Kompensasi

| No | Peruntukkan | 0-50 m ³ | 51-500 m ³ | 501-1000 m ³ | 1001-2500 m ³ | >2500 m ³ |
|----|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Non Niaga | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 2 | Niaga Kecil | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 3 | Industri Kecil | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | Niaga Besar | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 5 | Industri Besar | 5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |

Nilai bobot setiap kelompok tersebut dipakai sebagai pengali terhadap Harga Air Baku.

- (6) Setiap komponen Harga Dasar Air mempunyai prosentase masing - masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

Tabel c. Bobot Komponen Harga Dasar Air

| No | Komponen | Bobot |
|----|---|-------|
| 1 | Sumber Daya Alam | 60% |
| 2 | Kompensasi Pemulihan, Peruntukkan dan Pengelolaan | 40% |

- (7) Harga Air Baku adalah nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air baku tersebut. Air Baku dalam pengertian ini adalah air yang berasal dari air tanah termasuk mata air yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap dimanfaatkan.

Bagian Kedua

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Faktor Nilai Air Tanah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Sumberdaya Alam} = 60\% \times \text{Bobot Komponen Sumberdaya Alam}$$

(tabel c) (tabel a)

$$\text{Kompensasi} = 40\% \times \text{Bobot Komponen Kompensasi}$$

(tabel c) (tabel b) (+)

$$\text{Jumlah} = \text{Faktor Nilai Air Tanah (NPAT)}$$

- (2) Harga Dasar Air dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{HDA} = (\text{Faktor Nilai Air Tanah}) \times (\text{Harga Air Baku})$$

- (3) Nilai Perolehan Air Tanah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPAT} = (\text{Volume}) \times \text{HDA}$$

Pasal 10

Contoh Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah :

Contoh 1

Perusahaan XXX terdaftar di Kabupaten Katingan menyampaikan SPOPD Air Tanah dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : XXX
 Bidang Usaha : Pertambangan Biji Besi
 Kategori : Industri Besar
 Operasional sejak : Tahun 2012
 Tujuan penggunaan : Untuk produksi dan akomodasi
Meteran air : Terpasang
 Biaya pembuatan sumur bor : Rp. 150.000.000,00
 Biaya ops. sumur bor utk 5 thn : Rp. 60.000.000,00
 Perkiraan umur produksi sumur : 5 Tahun
 Debit air : 125 m³ per hari
 Kualitas Air Tanah : Baik
 Sumber Air Alternatif : Tidak Ada (diluar jaringan PDAM)

Volume penggunaan air untuk produksi dan akomodasi berdasarkan meteran air terpasang untuk bulan Januari 2012 sebanyak **3000 m³**.

Dengan mengikuti ketentuan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, ~~Pasal 7~~, Pasal 8 dan Pasal 9, maka tata cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Harga Air Baku

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Biaya Pembuatan Sumur Bor | = | Rp. 150.000.000,00 |
| Biaya Operasional 5 tahun | = | Rp. 60.000.000,00 |
| Jumlah | = | <u>Rp. 210.000.000,00</u> |

Volume pengambilan air selama 5 tahun adalah :

$$= 5 \times 365 \times 50 \text{ m}^3 = \mathbf{91.250 \text{ m}^3}$$

Jadi perhitungan **Harga Air Baku** adalah sebagai berikut :

$$= \text{Rp. } 210.000.000,00 / 91.250 \text{ m}^3$$
$$= \mathbf{\text{Rp. } 2.301,00 / \text{m}^3}$$

2. Menentukan Nilai Perolehan Air Tanah

a) Perhitungan Faktor Nilai Air :

- Volume 0 – 50 m³

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-------------|
| Komponen SDA | = | 4 x 0,6 = | 2,40 |
| Komponen Kompensasi | = | 5 x 0,4 = | <u>2,00</u> |
| Jumlah Faktor Nilai Air | = | | 4,40 |
- Volume 51 – 500 m³

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|
| Komponen SDA | = | 4 x 0,6 = | 2,40 |
| Komponen Kompensasi | = | 5,5 x 0,4 = | <u>2,20</u> |
| Jumlah Faktor Nilai Air | = | | 4,60 |
- Volume 501 – 1000 m³

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-------------|
| Komponen SDA | = | 4 x 0,6 = | 2,40 |
| Komponen Kompensasi | = | 6 x 0,4 = | <u>2,40</u> |
| Jumlah Faktor Nilai Air | = | | 4,80 |
- Volume 1001 – 2500 m³

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|
| Komponen SDA | = | 4 x 0,6 = | 2,40 |
| Komponen Kompensasi | = | 6,5 x 0,4 = | <u>2,60</u> |
| Jumlah Faktor Nilai Air | = | | 5,00 |
- Volume 2501 – 3000 m³

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-------------|
| Komponen SDA | = | 4 x 0,6 = | 2,40 |
| Komponen Kompensasi | = | 7 x 0,4 = | <u>2,80</u> |
| Jumlah Faktor Nilai Air | = | | 5,20 |

b) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah :

$$(\text{Volume} \times \text{FNA} \times \text{Harga Air Baku}) = (\text{Volume} \times \text{HDA})$$

- Volume 0 – 50 m³
= 50 x 4,40 x Rp. 2.301,00 = Rp. 506.220,00

- Volume 51 – 500 m³
= 450 x 4,60 x Rp. 2.301,00 = Rp. 4.763.070,00
- Volume 501 – 1000 m³
= 500 x 4,80 x Rp. 2.301,00 = Rp. 5.522.400,00
- Volume 1001 – 2500 m³
= 1500 x 5,00 x Rp. 2.301,00 = Rp. 17.257.500,00
- Volume 2501 – 3000 m³
= 500 x 5,20 x Rp. 2.301,00 = Rp. 5.982.600,00

Jumlah NPAT = Rp. 34.031.790,00

Dengan demikian, Pajak Air Tanah untuk Perusahaan XXX untuk Masa Pajak Bulan Januari 2012 ditetapkan sebesar :

= 20% x NPAT = Rp.6.806.358,00

Contoh 2

Perusahaan YYY terdaftar di Kabupaten Katingan menyampaikan SPOPD Air Tanah dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : YYY
 Bidang Usaha : Pembibitan
 Kategori : Niaga Kecil
 Operasional sejak : Tahun 2012
 Tujuan penggunaan : untuk produksi dan akomodasi
Meteran air : Terpasang
 Biaya Pembuatan sumur bor : Rp. 30.000.000,00
 Biaya ops. sumur bor utk 5 thn : Rp. 6.000.000,00
 Perkiraan umur produksi sumur : 5 Tahun
 Debit air : 50 m³ per hari
 Kualitas Air Tanah : Baik
 Sumber Air Alternatif : Tidak Ada (diluar jaringan PDAM)

Volume penggunaan air untuk produksi dan akomodasi berdasarkan meteran air terpasang untuk bulan Januari 2012 sebanyak **65 m³**.

Dengan mengikuti ketentuan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, maka tata cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Harga Air Baku:

Biaya Pembuatan Sumur Bor = Rp. 30.000.000,00
 Biaya Operasional selama 5 tahun = Rp. 6.000.000,00
 Jumlah = Rp. 36.000.000,00

Volume pengambilan air selama 5 tahun adalah :
 = 5 x 365 x 15 m³ = **27.375 m³**

Jadi perhitungan **Harga Air Baku** adalah sebagai berikut :
 = Rp. 36.000.000,00 / 27.375 m³
 = **Rp. 1.316,00 / m³**

2. Menentukan Nilai Perolehan Air Tanah

a) Perhitungan Faktor Nilai Air :

$$\begin{aligned} \circ \text{ Volume } 0 - 50 \text{ m}^3 \\ \text{Komponen SDA} &= 4 \times 0,6 = 2,40 \\ \text{Komponen Kompensasi} &= 2 \times 0,4 = \underline{0,80} \\ \text{Jumlah Faktor Nilai Air} &= 3,20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \circ \text{ Volume } 51 - 65 \text{ m}^3 \\ \text{Komponen SDA} &= 4 \times 0,6 = 2,40 \\ \text{Komponen Kompensasi} &= 2,2 \times 0,4 = \underline{0,88} \\ \text{Jumlah Faktor Nilai Air} &= 3,28 \end{aligned}$$

b) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah :

$$(\text{Volume} \times \text{FNA} \times \text{Harga Air Baku}) = (\text{Volume} \times \text{HDA})$$

$$\bullet \text{ Volume } 0 - 50 \text{ m}^3 \\ = 50 \times 3,20 \times \text{Rp. } 1.316,00 = \text{Rp. } 210.560,00$$

$$\bullet \text{ Volume } 51 - 65 \text{ m}^3 \\ = 15 \times 3,28 \times \text{Rp. } 1.316,00 = \underline{\text{Rp. } 64.747,00}$$

$$\text{Jumlah NPAT} = \underline{\text{Rp. } 275.307,00}$$

Dengan demikian, Pajak Air Tanah untuk Perusahaan YYY untuk Masa Pajak Bulan Januari 2012 ditetapkan sebesar :

$$= 20\% \times \text{NPAT} = \underline{\text{Rp. } 55.061,00}$$

Contoh 3

Perusahaan AAA terdaftar di Kabupaten Katingan menyampaikan SPOPD Air Tanah dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : AAA
Bidang Usaha : Pengolahan air kemasan
Kategori : Industri Kecil
Operasional sejak : Tahun 2012
Tujuan penggunaan : untuk produksi dan akomodasi
Meteran air : tidak terpasang
Biaya Pembuatan sumur bor : Rp. 150.000.000,00
Biaya ops. sumur bor utk 5 thn : Rp. 80.000.000,00
Perkiraan umur produksi sumur : 5 Tahun
Debit air : 200 m³ per hari
Kualitas Air Tanah : Baik
Sumber Air Alternatif : Tidak Ada (diluar jaringan PDAM)

Karena Wajib Pajak tidak memasang meteran air, maka Volume penggunaan air untuk produksi dan akomodasi untuk bulan Januari 2012 **ditetapkan secara Jabatan** sebesar sebanyak **2.650 m³**.

Dengan mengikuti ketentuan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, maka tata cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Harga Air Baku:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Biaya Pembuatan Sumur Bor | = Rp. 150.000.000,00 |
| Biaya Operasional selama 5 tahun | = Rp. 80.000.000,00 |
| Jumlah | = Rp. 230.000.000,00 |

Volume pengambilan air selama 5 tahun adalah :

$$= 5 \times 365 \times 200 \text{ m}^3 = 365.000 \text{ m}^3$$

Jadi perhitungan **Harga Air Baku** adalah sebagai berikut :

$$= \text{Rp. } 230.000.000,00 / 365.000 \text{ m}^3$$

$$= \text{Rp. } 630,00 / \text{m}^3$$

2. Menentukan Nilai Perolehan Air Tanah

a) Perhitungan Faktor Nilai Air :

- Volume 0 – 50 m³
Komponen SDA = 4 x 0,6 = 2,40
Komponen Kompensasi = 3 x 0,4 = 1,20
Jumlah Faktor Nilai Air = 3,60
- Volume 51 – 500 m³
Komponen SDA = 4 x 0,6 = 2,40
Komponen Kompensasi = 3,3 x 0,4 = 1,32
Jumlah Faktor Nilai Air = 3,72
- Volume 501 – 1000 m³
Komponen SDA = 4 x 0,6 = 2,40
Komponen Kompensasi = 3,6 x 0,4 = 1,44
Jumlah Faktor Nilai Air = 3,84
- Volume 1001 – 2500 m³
Komponen SDA = 4 x 0,6 = 2,40
Komponen Kompensasi = 3,9 x 0,4 = 1,56
Jumlah Faktor Nilai Air = 3,96
- Volume 2501 – 2650 m³
Komponen SDA = 4 x 0,6 = 2,40
Komponen Kompensasi = 4,2 x 0,4 = 1,68
Jumlah Faktor Nilai Air = 4,08

b) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah :

$$(Volume \times FNA \times \text{Harga Air Baku}) = (Volume \times HDA)$$

- Volume 0 – 50 m³
= 50 x 3,60 x Rp. 630,00 = Rp. 113.400,00
- Volume 51 – 500 m³
= 450 x 3,72 x Rp. 630,00 = Rp. 1.054.620,00
- Volume 501 – 1000 m³
= 500 x 3,84 x Rp. 630,00 = Rp. 1.209.600,00
- Volume 1001 – 2500 m³
= 1400 x 3,96 x Rp. 630,00 = Rp. 3.492.720,00
- Volume 2501 – 2650 m³
= 150 x 4,08 x Rp. 630,00 = Rp. 385.560,00
- Jumlah NPAT = Rp. 6.255.900,00**

Dengan demikian, Pajak Air Tanah untuk Perusahaan AAA untuk Masa Pajak Bulan Januari 212 ditetapkan sebesar :
= $20\% \times \text{NPAT}$ = **Rp.1.251.180,00**

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Pajak Air Tanah tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

Pajak Terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Air Tanah diambil dan/atau dimanfaatkan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 13

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender;

Pasal 14

- (1) Pajak Air Tanah Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan / atau pemanfaatan air atau sejak diterbitkan SKPD;
- (2) Pajak Air Tanah Terhutang ditetapkan setiap bulan takwin;

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk dibuatkan Nota Perhitungan Pajak..
- (4) Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan setiap bulan.
- (6) Bentuk Format Nota Perhitungan Pajak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Nota Perhitungan Pajak yang telah dibuat oleh Dinas Pertambangan Dan Energi disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diterbitkan SKPD.
- (2) Nota Perhitungan Pajak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak SPOPD diterima dengan dilengkapi SPOPD asli.

Pasal 17

- (1) Apabila SPOPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) maka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPOPD sebagaimana pada ayat (1) tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum diterbitkan STPD terlebih dahulu Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Energi.
- (4) Jumlah Pajak Terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jumlah Pajak Terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (5) Bentuk Format SPOPD tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPOPD dan Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat Yang Berwenang menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk Format SKPD dan STPD tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang ditentukan 3 (tiga) hari kerja sejak saat terhutangnya pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Terhutang bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 21

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 22

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 25

- (1) Pajak Terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

BAB VIII

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak;

- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami Force Majeure;

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat Yang Berwenang dapat membetulkan STPD, SKPD, atau SKPDKB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat Yang Berwenang dapat :
- a) mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya;
 - b) mengurangi atau membatalkan STPD, SKPD atau SKPDKB yang tidak benar;
 - c) mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan.
 - e) mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atas :
- a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan

- c) Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat, tanggal Pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi satu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pemohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Eupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a) diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b) ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Hutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 36

- (1) Seluruh lampiran pada Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan pada sebagian atau seluruh ketentuan dan atau sebagian atau seluruh formulir sebagaimana tercantum pada lampiran - lampiran Peraturan Bupati ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal lain yang dianggap perlu mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 17 Juli 2012

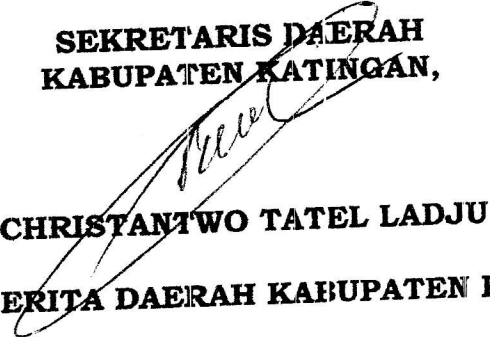
BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 17 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR ...71.....

| PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH) | No. Urut | |
|--|---|------------------------------|-------------|
| <p style="text-align: right;">Masa : Tahun :</p> <p>Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) : Tanggal Jatuh Tempo :</p> | | | |
| No | Kode Rekening | Uraian Pajak Daerah | Jumlah (Rp) |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak | |
| | | Jumlah Sanksi | |
| | | a. Bunga | |
| | | b. Kenaikan | |
| | | Jumlah Keseluruhan | |
| <p>Dengan huruf <i>Rupiah</i></p> <p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerima 2 Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan | | | |
| Kasongan, A.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah | | | |
|Potong Disini..... | | | |
| Tanda Terima : | | No. Urut | |
| Nama : Alamat : NPWD : |tgl..... Yang Menerima | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------|--|---------------------------|-----|----------------|-----|--|-----------|--|-----------|---|-----------|--------------------------|--|---------------------|-----|------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| PEMERINTAH KAB. KATINGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Komplek Perkantoran Kerenghumbang Telp (0536) 404326, Fax. (0536) 4043611 KASONGAN | <h1 style="margin: 0;">SKPDLB</h1> <p style="margin: 0;">(Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)</p> Masa Pajak : Tahun : | No. Urut <table border="1" style="margin: 0 auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama : Alamat : NPWPD : <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; margin: 0 5px;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; margin: 0 5px;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; margin: 0 5px;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> <table style="display: inline-table; border: 1px solid black; margin: 0 5px;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> Tanggal Jatuh Tempo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain - lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/ hutang pajak.</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl 9(1))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Psl 9(5))</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang Masih harus dibayar (4 - 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table> | | | 1. Dasar pengenaan | Rp. | 2. Pajak yang terhutang | Rp. | 3. Kredit Pajak : | | a. Setoran yang dilakukan | Rp. | b. Lain - lain | Rp. | c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/ hutang pajak. | Rp. _____ | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c) | Rp. _____ | 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) | Rp. _____ | 5. Sanksi administrasi : | | a. Bunga (Psl 9(1)) | Rp. | b. Kenaikan (Psl 9(5)) | Rp. _____ | c. Jumlah Sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | 6. Jumlah yang Masih harus dibayar (4 - 5c) | Rp. _____ |
| 1. Dasar pengenaan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pajak yang terhutang | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredit Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Lain - lain | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/ hutang pajak. | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Sanksi administrasi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Bunga (Psl 9(1)) | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Kenaikan (Psl 9(5)) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Jumlah Sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Jumlah yang Masih harus dibayar (4 - 5c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dengan Huruf <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <p>- Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|, Tahun a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah _____ NIP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------|--|---|-----|---------------------------|-----|----------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--------------------------|--|---------------------|-----|------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| PEMERINTAH KAB. KATINGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Komplek Perkantoran Kereng Humbang Telp (0536) 404326, Fax. (0536) 4043611 | <h2 style="margin: 0;">SKPDKB</h2> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun : | No. Urut <table border="1" style="margin: 0 auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain – lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl 9(1))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Psl 9(5))</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang Masih harus dibayar (4 – 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table> | | | 1. Dasar pengenaan | Rp. | 2. Pajak yang terhutang | Rp. | 3. Kredit Pajak : | | a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | b. Setoran yang dilakukan | Rp. | c. Lain – lain | Rp. _____ | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d) | Rp. _____ | 5. Sanksi administrasi : | | a. Bunga (Psl 9(1)) | Rp. | b. Kenaikan (Psl 9(5)) | Rp. _____ | c. Jumlah Sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | 6. Jumlah yang Masih harus dibayar (4 – 5c) | Rp. _____ |
| 1. Dasar pengenaan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pajak yang terhutang | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredit Pajak : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Lain – lain | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Sanksi administrasi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Bunga (Psl 9(1)) | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Kenaikan (Psl 9(5)) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Jumlah Sanksi administrasi (a + b) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Jumlah yang Masih harus dibayar (4 – 5c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dengan Huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Bayar Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|,Tahun a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan ----- NIP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |